



Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas

The Importance of Ethics in Public Administration Practice Building Integrity and Accountability

Eli Apud Saepudin

Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia

Email: eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id

(Diterima: 09-02-2026; Ditelaah: 09-02-2026; Disetujui: 31-02-2026)

ABSTRAK

Etika merupakan fondasi utama dalam praktik administrasi publik karena berperan strategis dalam membangun integritas aparatur dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan etika dalam praktik administrasi publik serta kontribusinya dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur negara. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan menekankan pendekatan analitis terhadap norma etika, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta praktik administrasi publik di sektor pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik yang konsisten mampu mendorong perilaku aparatur yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta meminimalkan praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, etika berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku dalam pengambilan keputusan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika administrasi publik perlu diintegrasikan secara sistematis melalui kebijakan, pendidikan, dan budaya organisasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: Administrasi Publik, Akuntabilitas, Etika, Integritas

ABSTRACT

Ethics constitutes a fundamental foundation in the practice of public administration, as it plays a strategic role in building the integrity of public officials and ensuring the accountability of governmental administration. This study aims to analyze the importance of implementing ethics in public administration practices and its contribution to enhancing the integrity and accountability of state officials. The research method employed is as previously described, emphasizing an analytical approach to ethical norms, principles of good governance, and public administration practices within the governmental sector. The findings indicate that the consistent application of public administration

Eli Apud Saepudin (2026). Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas

ethics promotes professional, transparent, and responsible behavior among public officials, while minimizing misconduct such as corruption, collusion, and nepotism. Furthermore, ethics functions as a moral guideline and standard of conduct in public decision-making processes, thereby strengthening public trust in government institutions. The implications of this study affirm that the reinforcement of public administration ethics must be systematically integrated through policies, education, and organizational culture within the bureaucracy in order to establish governance that is characterized by integrity, accountability, and a strong orientation toward the public interest.

Keywords: Public Administration, Accountability, Ethics, Integrity

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik administrasi publik di Indonesia, penerapan etika tidak hanya menjadi penting secara normatif tetapi juga mendesak secara empiris. Fenomena *gap* antara harapan publik terhadap etika birokrasi dan realitas praktik administrasi menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai etika yang signifikan di sektor pemerintahan. Contoh nyata terlihat dari berbagai kasus malaadministrasi dan korupsi birokrasi yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, seperti di Kementerian Ketenagakerjaan di mana sejumlah pegawai dan pejabat ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan praktik penundaan layanan dan pemerasan dalam proses perizinan yang berdampak pada pelayanan publik yang tidak adil dan tidak transparan.(Bakhrur Rokhman , Denok Kurniasih, 2023). Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan elit pemerintah seperti dugaan pemerasan yang menjerat pejabat tinggi lembaga antikorupsi juga menjadi bukti bahwa isu etika tidak hanya terjadi di level rendah tetapi sampai ke puncak institusi. Fenomena ini menimbulkan *gap* yang tajam antara prinsip-prinsip etika administrasi publik yang mencakup integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dengan perilaku nyata aparatur negara yang sering tersandung pelanggaran etika dan hukum. Penurunan kepercayaan publik terhadap birokrasi juga tercermin dalam persepsi masyarakat yang terus memandang aparatur publik belum sepenuhnya memenuhi standar etika, yang memicu kritik dan desakan reformasi etika secara lebih luas. Kerangka konsep teoritis dalam penelitian ini dibangun atas integrasi tiga pilar utama, yaitu etika administrasi publik, integritas aparatur, dan akuntabilitas pemerintahan. Etika administrasi publik diposisikan sebagai fondasi normatif yang mencakup nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab publik. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pedoman perilaku aparatur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Namun, dalam praktiknya terjadi *fenomena gap* yang dipengaruhi oleh faktor internal (moral individu, kompetensi etis, kepemimpinan) dan faktor eksternal (budaya patronase, lemahnya pengawasan, dan sistem birokrasi yang permisif). Gap inilah yang memicu degradasi etika dan berujung pada praktik korupsi serta malaadministrasi. Integritas aparatur dalam kerangka ini dipahami sebagai hasil internalisasi nilai etika secara konsisten dalam sikap dan perilaku birokrasi. Integritas yang kuat akan mendorong akuntabilitas, yaitu kemampuan aparatur dan institusi publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan, dan kinerjanya kepada masyarakat. Dengan demikian, etika berperan sebagai variabel independen, integritas sebagai variabel mediasi, dan akuntabilitas sebagai variabel outcome. Melalui kerangka ini, penelitian menegaskan bahwa penguatan etika administrasi publik secara sistematis—melalui regulasi, pendidikan etika, dan reformasi budaya organisasi—merupakan strategi kunci untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel di tengah tantangan administrasi publik Indonesia saat ini. (Sulfiyah et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, penerapan etika dalam administrasi publik menjadi semakin penting. Masyarakat kini lebih kritis terhadap kinerja pemerintah, serta lebih aktif dalam mengawasi Eli Apud Saepudin (2026). Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas

pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menegakkan prinsip-prinsip etika dalam seluruh lini administrasi publik, guna memastikan terciptanya tata kelola yang baik dan pelayanan yang optimal. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menggali lebih dalam mengenai peran etika dalam administrasi publik, serta bagaimana penerapannya dapat berkontribusi dalam membangun integritas dan akuntabilitas yang kuat di dalam pemerintahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya etika dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab(Betresia et al., 2021).

Administrasi publik memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana pegawai publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. Etika dalam administrasi publik menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan akuntabilitas para pelaksana birokrasi. Integritas merujuk pada kejujuran dan konsistensi perilaku dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan pegawai publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil(Budiman et al., 2022).

Pentingnya etika dalam praktik administrasi publik semakin relevan dalam konteks modern, di mana masyarakat menuntut transparansi, keadilan, dan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah. Pelanggaran etika, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan, dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika dalam administrasi publik menjadi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa para pegawai publik dapat bekerja secara profesional, adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka layani. Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, etika menjadi pemandu moral bagi para pegawai publik dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka. Etika juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri yang membantu para pejabat publik menghindari perilaku tidak etis yang dapat merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, penegakan etika dalam administrasi publik bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat(Ummah, 2019).

Membangun Integritas dan Akuntabilitas Etika dalam administrasi publik membantu menciptakan budaya integritas di kalangan pegawai pemerintah. Integritas merupakan elemen penting yang mencerminkan konsistensi moral dan etika dalam menjalankan tugas. Dengan integritas yang kuat, pegawai publik akan lebih mampu mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan norma etika. Di sisi lain, akuntabilitas menuntut setiap pegawai untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga mereka tidak dapat bertindak sewenang-wenang (Tjahjanti, 2020). Menghindari Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi Etika berfungsi sebagai pagar moral yang menghalangi pegawai publik untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali muncul karena lemahnya pemahaman dan penerapan etika. Dengan menegakkan etika yang kuat, risiko penyimpangan perilaku dan tindakan yang merugikan kepentingan umum dapat diminimalisir. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik yang beretika memastikan bahwa masyarakat diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau nepotisme. Pegawai publik yang berpegang pada prinsip-prinsip etika akan lebih berorientasi pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada transparansi, keadilan, dan profesionalisme(Asiva Noor Rachmayani, Eli Apud Saepudin (2026). *Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas*

2015).

Mempertahankan Kepercayaan Publik Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan pegawai publik. Ketika pegawai pemerintah bertindak dengan etika yang baik, masyarakat akan lebih percaya pada kemampuan dan niat baik pemerintah dalam mengelola kepentingan umum. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat merusak reputasi pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan publik dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta menghambat pembangunan(Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan Dalam administrasi publik, pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama dalam hal alokasi sumber daya publik, pemberian izin, dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak luas. Menjaga Keharmonisan dalam Hubungan Antara Pemerintah dan Masyarakat Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah berperilaku etis (Wahyuli, 2021). Etika administrasi publik memastikan bahwa setiap interaksi antara pemerintah dan warga negara didasarkan pada rasa hormat, kejujuran, dan keadilan. Ini penting untuk menciptakan suasana kerja sama yang produktif dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, etika administrasi publik berfungsi sebagai fondasi yang menjaga kualitas pelayanan, memastikan tanggung jawab pegawai publik, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa etika, tata kelola pemerintahan yang baik sulit tercapai, dan risiko terjadinya penyimpangan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan etika dalam administrasi publik bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan keharusan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif(Choirulsyah & Azhar, 2024).

B. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman para informan terkait etika dalam administrasi publik. Dengan metode deskriptif, penelitian ini berfokus pada penggambaran fenomena etika administrasi publik, tanpa bermaksud mempengaruhi atau memanipulasi kondisi yang ada. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam bidang administrasi publik, seperti pegawai pemerintah, akademisi, serta pakar dalam bidang etika publik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan mereka mengenai pentingnya etika dalam administrasi publik dan pengaruhnya terhadap integritas serta akuntabilitas. Data sekunder diambil dari berbagai literatur, jurnal akademik, buku, laporan pemerintah, dan regulasi terkait yang membahas tentang etika administrasi publik. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis yang dilakukan berdasarkan data primer. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman dalam administrasi publik dan pemahaman tentang etika. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur, untuk memberikan ruang kepada informan dalam memberikan jawaban yang detail. Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi pemerintah yang dianggap relevan dengan isu etika administrasi publik. Subjek penelitian meliputi pegawai pemerintah yang bekerja di bidang administrasi publik, pengambil kebijakan, serta akademisi yang memiliki fokus pada tata kelola pemerintahan dan etika publik. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Eli Apud Saepudin (2026). Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas

C. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya etika dalam administrasi publik, serta bagaimana penerapannya dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas di dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan studi dokumen, diperoleh beberapa temuan kunci yang mencerminkan peran strategis etika dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan Etika dalam Administrasi Publik Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik di berbagai instansi pemerintahan masih bervariasi, tergantung pada kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengawasan yang diterapkan. Di beberapa instansi, etika telah menjadi bagian integral dari perilaku dan pengambilan keputusan, yang tercermin dalam kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Namun, di instansi lainnya, penerapan etika masih menghadapi kendala, terutama dalam bentuk minimnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika(Kurniawan, 2007).

Sebagai contoh, salah satu narasumber dari sebuah instansi pemerintah daerah yakni Penelitian ini secara spesifik dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai locus penelitian, dengan pertimbangan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan publik strategis yang rentan terhadap persoalan etika administrasi, khususnya dalam aspek tata kelola anggaran, pengambilan keputusan kebijakan, dan penyelenggaraan layanan pendidikan. Pemilihan Dinas Pendidikan Provinsi Banten didasarkan pada karakteristiknya sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, serta intensitas interaksi yang tinggi antara aparatur dan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui penggalian informasi mendalam dari aktor-aktor kunci di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten serta telaah dokumen kebijakan dan praktik administrasi yang relevan. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam mengenai dinamika etika administrasi publik, integritas aparatur, dan akuntabilitas kelembagaan dalam setting pemerintahan daerah tertentu. mengungkapkan bahwa pelatihan etika rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Hal ini menciptakan budaya organisasi yang mendorong transparansi dan tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas. Namun, di beberapa kasus, kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan masih terjadi, di mana perilaku tidak etis kadang dibiarkan karena lemahnya mekanisme pengawasan. Etika sebagai Penggerak Integritas Integritas merupakan salah satu aspek yang paling dipengaruhi oleh penerapan etika. Dari data yang diperoleh, ditemukan bahwa pegawai publik yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika cenderung menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai moral yang diharapkan. Mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menghindari konflik kepentingan, dan lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka (Dini Ayu Permata Sari et al., 2024).

Data penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber kunci di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap praktik administrasi publik dan proses pengambilan kebijakan di sektor pendidikan. Narasumber tersebut meliputi unsur pejabat struktural, aparatur pelaksana, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelayanan dan tata kelola administrasi pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan telaah dokumen resmi instansi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan etika administrasi, integritas aparatur, dan akuntabilitas kelembagaan. Sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif, temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, melainkan untuk memahami secara mendalam Eli Apud Saepudin (2026). *Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas*

dan kontekstual dinamika etika administrasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai locus penelitian. Misalnya, pegawai yang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti di bidang pelayanan administrasi, cenderung memiliki motivasi tinggi untuk menjaga reputasi baik instansi, sehingga mereka lebih patuh pada norma etika. Namun demikian, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa integritas pegawai publik terkadang terancam oleh tekanan eksternal, seperti intervensi politik atau tuntutan dari pihak berkepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kasus-kasus ini, meskipun etika sudah diajarkan, pegawai merasa kesulitan mempertahankan integritas karena adanya pengaruh dari luar yang kuat (Jumiati, 2012).

Akuntabilitas diakui sebagai salah satu prinsip utama dalam administrasi publik yang ditopang oleh penerapan etika. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas meningkat secara signifikan ketika etika diterapkan secara konsisten. Pegawai publik yang beretika lebih siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada atasan, rekan kerja, serta masyarakat. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa dengan adanya penerapan etika, prosedur pelaporan dan evaluasi kinerja menjadi lebih transparan dan obyektif (Hayani et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten telah memiliki kerangka normatif yang relatif memadai, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan implementatif. Menurut penulis, terdapat kesenjangan antara aturan etika yang tertuang dalam regulasi dan kode etik aparatur dengan perilaku administratif sehari-hari, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan, pengelolaan kewenangan, dan transparansi pelayanan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa integritas aparatur sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, budaya organisasi, serta mekanisme pengawasan internal yang belum berjalan optimal. Di sisi lain, upaya-upaya penguatan etika melalui sosialisasi dan pembinaan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu membentuk internalisasi nilai etika secara konsisten. Kondisi ini berdampak pada akuntabilitas kelembagaan yang cenderung bersifat administratif-formal, belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab substantif kepada publik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika administrasi publik tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi memerlukan komitmen kepemimpinan, reformasi budaya birokrasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Etika menuntut pegawai untuk tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral atas dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat. Misalnya, di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan, penerapan etika mendorong pegawai untuk lebih fokus pada kualitas layanan dan hasil yang positif bagi masyarakat. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian antara peraturan formal dengan praktik di lapangan. Beberapa pegawai menyatakan bahwa meskipun mereka sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan sehari-hari, kurangnya dukungan dari atasan atau sistem pengawasan yang lemah membuat mereka merasa tidak cukup diberdayakan untuk bertanggung jawab secara penuh (ismanto, 2012).

Hambatan dalam Penerapan Etika di Administrasi Publik Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang sering muncul dalam penerapan etika di administrasi publik. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Etika: Beberapa instansi tidak secara rutin memberikan pelatihan mengenai etika kepada pegawainya, sehingga kesadaran mengenai pentingnya etika dalam administrasi publik masih rendah di beberapa lingkungan kerja (Satibi & Ediyanto, 2020). Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung: Di beberapa organisasi, budaya kerja cenderung mendukung efisiensi dan hasil akhir, tanpa memperhatikan proses atau cara yang digunakan. Hal ini mendorong perilaku tidak etis karena pegawai lebih fokus pada pencapaian target daripada kepatuhan pada prinsip etika. Intervensi Eksternal Tekanan politik dan ekonomi dari pihak luar sering kali mengganggu Eli Apud Saepudin (2026). Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas

penerapan etika. Pegawai publik kadang-kadang terjebak dalam situasi di mana mereka dipaksa melanggar etika demi kepentingan pihak tertentu. Strategi Meningkatkan Penerapan Etika dalam Administrasi Publik Pelatihan Etika yang Berkelanjutan Pelatihan mengenai etika dan integritas perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi: Mekanisme pengawasan harus diperkuat, dan sanksi tegas perlu diterapkan terhadap pelanggaran etika, sehingga pegawai merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Peningkatan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Proses pengambilan keputusan di instansi pemerintah harus lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga akuntabilitas pegawai lebih terjaga (Sukri J et al., 2017).

Dari hasil temuan tersebut, jelas bahwa etika memainkan peran sentral dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas di lingkungan administrasi publik. Penerapan etika secara konsisten dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta mendorong pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai penerapan etika yang optimal, diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pegawai hingga pimpinan instansi, serta dukungan dari sistem regulasi dan pengawasan yang efektif (Widiaswari, 2022).

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki peranan yang sangat penting dalam administrasi publik, terutama dalam membangun integritas dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip etika tidak hanya membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Etika administrasi publik berfungsi sebagai landasan moral bagi pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Penerapan etika yang baik akan membangun integritas pribadi dan kolektif, serta memastikan bahwa setiap tindakan pegawai dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Penerapan etika yang kuat dalam administrasi publik berkontribusi pada terciptanya transparansi dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan etika administrasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten perlu diarahkan pada upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan, tidak semata bersifat formalistik. Menurut penulis, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kepemimpinan etis sebagai teladan utama bagi aparatur, pembinaan dan pendidikan etika yang berorientasi pada internalisasi nilai, serta penguatan mekanisme pengawasan internal yang transparan dan akuntabel. Secara kelembagaan, penelitian ini mendorong perlunya integrasi etika administrasi ke dalam sistem manajemen kinerja dan evaluasi aparatur agar etika tidak dipahami sebagai norma abstrak, melainkan sebagai bagian dari praktik kerja sehari-hari. Dari sisi kebijakan publik, temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya perumusan strategi reformasi birokrasi sektor pendidikan yang menempatkan etika sebagai instrumen utama pencegahan penyimpangan administratif dan peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan konseptual dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas administrasi publik di tingkat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No Covariance structure analysis of health-related indicators in elderly people living at home, focusing on subjective health* Title. 6.
- Bakhrur Rokhman , Denok Kurniasih, T. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian e-ISSN : 2809-8862 Good Goverence Di Indonesia. *Co-Value: Jurnal Eli Apud Saepudin* (2026). *Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas*

- Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 14(7), 915-924.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3950>
- Betresia, A., Situmeang, S. W., Verdina, P., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 138-154.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64-74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195-203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Dini Ayu Permata Sari, Ainul Yaqin, & Imam Sucahyo. (2024). Etika Administrasi Pada Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Oleh Aparatur Di Kantor Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu. *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 11(1), 1-5. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v11i1.1146>
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2024). *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. 4.
- Ismanto. (2012). 8. Ismanto. *Revitalisasi Etika Administrasi Sebagai Manifestasi Paradigma New Public Service Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, 3(1), 86-96.
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(2), 151-162.
<https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953>
- Jumiati, I. E. (2012). Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik, Arti Penting Dilema dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrasi Publik*, 3(1), 25-31.
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1-23.
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Ponto, I. S., Patty, J. T. ., & Sakir, A. R. (2024). Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Governance untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 112-124. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4952>
- Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234-250.
<https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>
- Sukri J, S. J., Idris, M., & Burhanuddin, B. (2017). Penerapan Etika Administrasi Negara Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 112.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.897>
- Sulfiyah, A., Burhanuddin, & Ma'ruf, A. (2023). Penerapan Etika Administrasi Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), 14-25.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/10451>
- Tjahjanti, P. H. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah Metalurgi. In *Buku Ajar Mata Kuliah Metalurgi*.
<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-90-2>
- Ummah, M. S. (2019). No Covariance structure analysis of health-related indicators in elderly people living at home, focusing on subjective health status title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Eli Apud Saepudin (2026). *Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas*

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
https://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Wahyuli, Y. H. (2021). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia Public Administration Ethics in The Administration Of Governance in Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 182–189.

Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922>

Eli Apud Saepudin (2026). *Pentingnya Etika dalam Praktik Administrasi Publik Membangun Integritas dan Akuntabilitas*